

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai advokasi Greenpeace Indonesia dalam mendorong agenda keadilan iklim pada Pilkada DKI Jakarta 2024, maka dapat penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menemukan bahwa Greenpeace Indonesia mengonstruksi keadilan iklim sebagai agenda advokasi melalui proses pembingkai isu lingkungan yang menghubungkan persoalan ekologis dengan pengalaman ketidakadilan masyarakat terdampak. Konstruksi tersebut dilakukan melalui produksi pengetahuan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penyampaian narasi mengenai kondisi lingkungan Jakarta kepada aktor politik dan publik. Melalui riset “Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan”, Greenpeace Indonesia menyuarakan berbagai persoalan lingkungan seperti ancaman perubahan iklim, pencemaran udara, kerentanan masyarakat pesisir, serta ketimpangan dampak lingkungan sebagai isu yang membutuhkan respons kebijakan pada tingkat daerah. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024, advokasi Greenpeace diarahkan untuk menghadirkan isu keadilan iklim dalam ruang politik melalui komunikasi dengan penyelenggara pemilu, pasangan calon kepala daerah, serta masyarakat luas. Konstruksi keadilan iklim tersebut menunjukkan posisi Greenpeace Indonesia sebagai aktor masyarakat sipil yang menghubungkan pengalaman masyarakat terdampak dengan proses politik

formal. Melalui strategi advokasi yang melibatkan riset, kampanye publik, komunikasi politik, dan penyebaran informasi, Greenpeace berupaya membangun perhatian terhadap agenda lingkungan dalam kontestasi politik.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya bersama Greenpeace Indonesia untuk mendukung keadilan iklim dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 merupakan hasil dari proses pembentukan identitas sosial kolektif (*social identity*), pemahaman mengenai ketidakadilan (*perceived injustice*), dan penguatan keyakinan terhadap efektivitas aksi bersama (*collective efficacy*). Identitas kolektif menjadi langkah awal dalam menyadari adanya kelompok yang peduli dan memiliki tujuan serupa mengenai masalah krisis iklim. Dengan menyampaikan narasi tentang perlindungan lingkungan, keberlanjutan tempat tinggal, dan partisipasi masyarakat yang terdampak, Greenpeace Indonesia menciptakan rasa keterhubungan antara organisasi, komunitas, dan individu yang memandang isu perubahan iklim sebagai tantangan bersama. Pembentukan identitas kolektif ini terhubung dengan proses pemahaman tentang ketidakadilan iklim. Greenpeace Indonesia menjelaskan dampak dari perubahan iklim sebagai masalah yang membawa konsekuensi sosial kepada kelompok tertentu, terutama mereka yang lebih rentan terhadap tekanan lingkungan. Pengalaman masyarakat Pulau Pari dan Marunda menjadi bagian dari narasi yang menggambarkan ketidakmerataan dalam distribusi risiko lingkungan, di mana kelompok yang kontribusinya minim terhadap krisis iklim justru mengalami dampak yang besar. Pandangan ini memperkuat pengertian bersama bahwa isu iklim

memiliki aspek sosial dan politik yang memerlukan tindakan bersama. Selanjutnya, identitas bersama dan pemahaman tentang ketidakadilan itu menguatkan keyakinan terhadap efektivitas aksi kolektif, yaitu kepercayaan bahwa tindakan bersama dapat mengubah keadaan. Keyakinan ini tumbuh melalui beragam bentuk partisipasi publik, penguatan jaringan gerakan, dan strategi advokasi yang diimplementasikan oleh Greenpeace Indonesia. Wujud dari keyakinan kolektif terlihat dalam tiga jenis aksi bersama, yakni tindakan kolektif institusional melalui keikutsertaan dalam politik formal, tindakan kolektif yang penuh tantangan melalui penyampaian tuntutan dan tekanan dari publik, serta tindakan kolektif yang dimediasi secara digital melalui pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan informasi dan menggerakkan partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksi kolektif Greenpeace Indonesia terwujud melalui komunikasi dan mobilisasi sosial yang menghubungkan identitas bersama, pengalaman akan ketidakadilan, serta keyakinan dalam kapasitas tindakan kolektif untuk memperluas agenda keadilan iklim di arena politik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian dapat menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan analisis mengenai pengalaman aktor gerakan sosial dengan pengukuran keterlibatan publik di ruang digital sehingga menghasilkan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan aktivisme lingkungan kontemporer.

2. Kajian mengenai hubungan antara gerakan sosial, ruang digital, dan proses kebijakan publik perlu terus dikembangkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran dalam memperluas penyebaran isu, membangun identitas kolektif, serta meningkatkan keterlibatan publik terhadap persoalan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih jauh mengenai sejauh mana aktivitas digital mampu memengaruhi perubahan persepsi publik, agenda politik, maupun proses perumusan kebijakan lingkungan.
3. Pemerintah daerah dan aktor politik perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan lingkungan. Pengalaman advokasi Greenpeace Indonesia dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 menunjukkan bahwa isu krisis iklim telah menjadi bagian dari persoalan tata kelola kota yang membutuhkan respons politik. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan kelompok terdampak perlu dipandang sebagai sumber pengetahuan serta masukan kebijakan untuk menciptakan pembangunan kota yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan.